



Nomor : Yogyakarta, 31 Juni 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Pengendalian Gratifikasi,
Pengungkapan Dugaan
Pelanggaran, Benturan
Kepentingan, Kejadian Risiko/*Risk Event*, Pelaksanaan Atas Rencana
Tindak Pengendalian (RTP), Respon
Terhadap Risiko Kecurangan, dan
Laporan SPBE di Lingkungan
Perangkat Daerah pada Triwulan I
Tahun 2026.

Yth. Inspektur DIY
di Yogyakarta

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/700.1.2/1046/INS tanggal 26 Juni 2026 perihal Permintaan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/*Risk Event*, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Respon Terhadap Risiko Kecurangan, dan Laporan SPBE di Lingkungan Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2026, dengan ini disampaikan bahwa Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY melaporkan sebagai berikut:

1. Laporan Pengendalian Gratifikasi (Triwulan II)

No	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
1	NIHIL	-	-	-
Total				

2. Laporan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran (Triwulan II)

No	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
1	NIHIL	-	-	-
Total				

3. Laporan Benturan Kepentingan (Triwulan II)

No	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
1	NIHIL	-	-	-
Total				

4. Laporan Kejadian Risiko/*Risk Event* (Triwulan II)

No	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
1	NIHIL	-	-	-
Total				

5. Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan (Triwulan II)

a. Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Strategis Perangkat Daerah

No	Pernyataan Risiko	RTP	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Setelah Pelaksanaan RTP
1.	bahan kebijakan yang dihasilkan tidak mendukung program pemda	penggalan isu-isu terkini yang mendesak untuk segera selesaikan	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja biro Audiensi, Koordinasi dan Konsultasi dengan fihak-fihak terkait	Triwulan I	https://drive.google.com/drive/folders/13UxFGgH_MHxf7DUL_v9flOouyCDTBXML?usp=sharing	2
2.	kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, pelayanan dasar dan pelayanan dasar tidak menjadi naskah bahan kebijakan	Komunikasi dan Koordinasi secara berkala dengan pelaksana teknis sebagai Kontrol kualitas aktifitas penyiapan bahan kebijakan	Dilaksanakan melalui pertemuan rutin dan komunikasi aktif dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas aktifitas penyiaoon bahan kebijakan yang sedang dikerjakan.	Triwulan III		

b. Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Operasional Perangkat Daerah

No	Pernyataan Risiko	RTP	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Setelah Pelaksanaan RTP
1.	Perubahan jadwal dari penyelenggaraan Festival Keagamaan	Koordinasi secara berkala untuk mengkomunikasikan mengenai jadwal pelaksanaan festival atau kegiatan tersebut	Dilaksanakan melalui pertemuan rutin dan komunikasi aktif dengan pihak terkait untuk memastikan kesesuaian jadwal, persiapan, serta pelaksanaan kegiatan.	Triwulan II		

No	Pernyataan Risiko	RTP	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Setelah Pelaksanaan RTP
2.	Ketepatan masyarakat merealisasikan dan melaporkan dana hibah yg diterima tidak sesuai dgn timeline	Melakukan Koordinasi dan Monev kepada penerima hibah	Dilakukan dengan melakukan monitoring langsung ke lapangan dan juga membuka konsultasi pelaporan melalui WAG	Triwulan III		
3.	Sinkronisasi jadwal kegiatan sulit dilakukan karena menyesuaikan dengan jadwal dari Dewan	Koordinasi secara berkala dengan pihak terkait	Dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan pihak terkait untuk menyamakan persepsi, memperoleh dukungan, serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.	Triwulan III		
4.	Pelaksanaan SK Setda tentang Penetapan Kuota Calon Petugas Haji Daerah yang kurang maksimal	Koordinasi intensif dgn kab/kota tentang urgensi layanan Petugas bagi jamaah haji di daerahnya	Dilakukan dengan meninjau dan menyusun pembaruan ketentuan teknis bersama instansi terkait agar proses berjalan lebih transparan dan akuntabel.	Triwulan IV		
5.	Tidak mengirimkan petugas haji daerah dengan jumlah formasi ideal	Koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait (Kanwil Kemenag, Kemenag RI, TAPD DIY, dan Bagian Kesra Kabupaten/Kota)	Dijalankan melalui rapat atau komunikasi intensif guna menyelaraskan kebijakan, data, dan langkah pelaksanaan kegiatan, meliputi pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan, identifikasi kendala, serta penyusunan langkah tindak lanjut.	Triwulan IV		

No	Pernyataan Risiko	RTP	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Setelah Pelaksanaan RTP
6.	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan proses pengumpulan data memerlukan waktu	Memilih instrumen pengumpulan data yang paling tepat	Menentukan alat atau mekanisme yang paling sesuai dalam pengumpulan data dan pelaporan hasil kegiatan.	Triwulan III		
7.	Peran Tenaga Ahli kurang optimal	Koordinasi antar pihak dan antar Tenaga Ahli lebih intensif dan mencari alternatif cara diskusi	Dilaksanakan melalui pembahasan rutin setiap bulan guna memantau proses kegiatan, menilai capaian kinerja tenaga ahli, serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah ditetapkan.	Triwulan III		
8.	Peserta yang hadir untuk rapat kurang memahami materi diskusi	Memastikan kehadiran peserta H-1 sebelum acara dan komunikasi lebih intensif dengan instansi terkait	Dilakukan melalui koordinasi administratif dan komunikasi intensif untuk memastikan kesiapan seluruh peserta dan instansi terkait.	Triwulan III		
9.	Proses pengumpulan informasi kurang maksimal karena peserta yang terbatas	Menyelenggarakan pertemuan daring/luring yang intensif setiap bulan untuk pembahasan substansi rumusan bahan kebijakan sesuai dengan bidang dari masing-masing OPD/mitra	Dilaksanakan dengan melakukan penjadwalan ulang kegiatan paparan progres untuk menyesuaikan kebutuhan dan ketersediaan waktu, serta mengintensifkan pembahasan guna memperdalam analisis dan memastikan penyelesaian kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.	Triwulan III		

No	Pernyataan Risiko	RTP	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Setelah Pelaksanaan RTP
10.	Masukan dari personel tim kelompok kerja tidak optimal	Menyelenggarakan pertemuan daring/luring yang intensif setiap bulan untuk pembahasan substansi rumusan bahan kebijakan sesuai dengan bidang dari masing-masing OPD/mitra	Dilaksanakan melalui perumusan peserta dari OPD atau elemen masyarakat yang relevan dengan tema kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana blended meeting yang memadai untuk mendukung pelaksanaan secara daring maupun luring, serta penyusunan alat bantu digital (seperti Google Form) yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan guna mempermudah proses pendataan dan evaluasi.	Triwulan III		
11.	Hasil kerja tenaga ahli kurang berkualitas	Menyelenggarakan pertemuan daring/luring yang intensif setiap bulan untuk pembahasan substansi rumusan bahan kebijakan	Dilaksanakan melalui koordinasi rutin dengan tim tenaga ahli untuk menyamakan persepsi terkait substansi kegiatan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap progres pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pelaporan akhir guna memastikan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.	Triwulan IV		
12.	Desain metodologi kajian yang kurang sesuai	Koordinasi dengan tim tenaga ahli untuk menyamakan persepsi Melakukan evaluasi progres kajian dari tahap awal penyusunan hingga pelaporan akhir	Dilaksanakan melalui pembahasan rutin setiap bulan guna memantau proses kegiatan, menilai capaian kinerja tenaga ahli, serta memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah ditetapkan.	Triwulan III		

c. Pelaksanaan Atas Respon Terhadap Risiko Kecurangan

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Setelah Pelaksanaan RTP
1.	Korupsi- Kickback atau kesepakatan suap setelah direkomendasikan sebagai penerima hibah	ganti rugi	Sosialisasi pelayanan tanpa pungutan Membuka layanan pengaduan Menguatkan peran pengawasan internal melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk mencegah tindak korupsi	Setiap tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1
2.	Korupsi- Manipulasi data/dokumen pencairan/pelaporan hibah yang tidak sesuai	ganti rugi	Sosialisasi regulasi, juknis sampai dengan keabsahan dokumen Selektif memilih petugas survey Waskat kepada petugas	Setiap tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1
3.	Pembayaran tidak sah	ganti rugi	- Terdapat prosedur rinci mengenai pengajuan pembayaran pengeluaran berupa Keputusan Kepala Biro tentang Standar Operasional Prosedur Internal; - Terdapat pemisahan fungsi masing-masing pegawai terkait transaksi pengeluaran pada petugas Keuangan, yaitu terdapat Pembantu Penatausahaan Keuangan yang terdiri dari verifikator keuangan dan pembuat laporan akuntansi, - Bendahara pengeluaran yang dibantu oleh pengadministrasi keuangan dan pengelola Cash Management System (CMS). Selain itu, pada setiap sub bagian terdapat PUMK yang bertugas mengajukan	Setiap bulan	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Setelah Pelaksanaan RTP
			kebutuhan dana kepada bendahara pengeluaran berdasarkan DPA/anggaran kas; - Terdapat mekanisme penghitungan kembali rincian pengeluaran dengan jumlah total pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebelum melakukan pembayaran. Bendahara pengeluaran menggunakan aplikasi SIPD dan aplikasi pendukung lain; - Terdapat SK terkait Pejabat Pengadaan; - Bendahara dan pengelola gaji telah mendapatkan pelatihan.			
4.	Pengambilan uang secara tidak sah	ganti rugi	- Penggunaan cek atas nama bukan atas cek unjukan; - Penggunaan Pre-number cek; - Terdapat buku kendali dalam bentuk excel untuk mencatat setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi yang ditandatangani namun tanpa persetujuan KaTU; - Telah dilakukan verifikasi pada saat pengajuan SPJ antara nomor rekening tujuan dengan nomor yang tercantum dalam tagihan; - Telah dilakukan rekonsiliasi bank secara periodik oleh bendahara setiap bulan. - Menginstruksikan Bendahara dan PPK untuk melakukan monitoring atas setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi.	Setiap triwulan	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Setelah Pelaksanaan RTP
5.	Pembayaran gaji/TPP/Tunjangan kepada pegawai yang lebih besar dari yang seharusnya	ganti rugi	- Terdapat SOP Pengelolaan Data Kepegawaian; - Adanya pemisahan tugas antara pembuat daftar gaji/TPP/Tunjangan, yaitu oleh pengelola/pengadministrasi gaji dengan petugas pengadministrasi kepegawaian yang melakukan pembaharuan data dasar pembayaran gaji/TPP/Tunjangan; - Secara periodik dilakukan rekonsiliasi antara jumlah pegawai dalam Daftar Gaji/TPP/Tunjangan dengan jumlah pegawai aktif.	Setiap semester	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1
6.	Perencanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kebutuhan	ganti rugi	- Pengawasan Manajerial (Preventif); - Perencanaan pengadaan barang dan jasa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - Pemerintah Melalui Penyedia	Sesuai jadwal pengadaan	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	2
7.	Anggaran/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa ditinggikan (<i>markup</i>)	ganti rugi	- Memperkuat peran pengawasan internal melalui review atas perencanaan pengadaan untuk pencegahan kecurangan perencanaan PBJ; - Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa;3. Penandatanganan pakta integritas bagi pihak yang terkait dalam perencanaan pengadaan aset an persediaan	Sesuai jadwal pengadaan	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Setelah Pelaksanaan RTP
8.	Risiko pengadaan fiktif	ganti rugi	- Pengawasan Manajerial (Preventif) - Terdapat Tim Pendukung/Tim Teknis PPK/PPTK - dalam melakukan penerimaan dan pemeriksaan barang; - Terdapat petugas gudang/penyimpan barang; - Barang yang diterima dan dikeluarkan/ digunakan - telah diadministrasikan; - Terdapat kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan - sebagai dasar pembayaran, yaitu Berita Acara Hasil - Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Hasil - Pekerjaan, dan kuitansi pembayaran	Sesuai jadwal pengadaan	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	2
9.	PA/KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima gratifikasi dari calon rekanan atau rekanan	ganti rugi	- Pengawasan Manajerial (Preventif) - Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi, antara lain dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan dukasi pencegahan kecurangan serta pengendalian gratifikasi di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat	Setiap semester	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1
10.	Korupsi- suap/ gratifikasi dalam proses mempercepat/ memperlancar proses pengurusan berkas kepegawaian	Tindakan Lain	- Kebijakan dan Prosedur Etika (Preventif) - Memperkuat peran pengawasan internal dengan melakukan digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian; - Melakukan reviu/pengawasan intern atas pengelolaan data kepegawaian; - Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait pengelolaan data kepegawaian;	Setiap semester	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Setelah Pelaksanaan RTP
11.	Korupsi- Conflict of interest dalam rekrutmen pegawai	Tindakan Lain	- Kebijakan dan Prosedur Etika (Preventif) - Memperkuat peran pengawasan internal dengan melakukan digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian; - Melakukan revidu/pengawasan intern atas pengelolaan data kepegawaian; - Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait pengelolaan data kepegawaian;	Setiap triwulan	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWWfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1
12	Perencanaan pengadaan Aset dan Persediaan tidak sesuai kebutuhan	ganti rugi/Tindakan Lain	- Menyampaikan informasi akan kebutuhan barang untuk diusulkan kepada pegawai; - Memeriksa kondisi fisik barang atau inventaris yang layak diganti atau diperbaiki serta rencana kebutuhan barang tahun mendatang dalam rangka tuntutan kerja;	Setiap tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWWfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	2
13.	Penggunaan aset dan persediaan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi pegawai/pejabat	ganti rugi/Tindakan Lain	- Pencatatan penggunaan dan pengguna - Sosialisasi Penggunaan aset dan barang persediaan yang sesuai regulasi	Setiap semester	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWWfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Link Bukti Dukung	Skor Risiko Setelah Pelaksanaan RTP
14.	Penyalahgunaan/ penggelapaaan aset	ganti rugi/Tindakan Lain	- Pencatatan penggunaan dan pengguna - Sosialisasi Penggunaan aset dan barang persediaan yang sesuai regulasi - Melakukan proses verifikasi secara cermat dan teliti atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang dilengkapi dengan laporan/notulen	Setiap semester	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1
15.	Penyalahgunaan data Sistem Informasi Manajemen (SIM)	ganti rugi/Tindakan Lain	- Pengawasan Manajerial (Preventif) - Pembatasan hak akses/otorisasi bagi operator aplikasi Sistem Informasi - Terdapat backup arsip data secara rutin - Terdapat kerja sama dengan Dinas Kominfo D.I. Yogyakarta terkait Rekomendasi SPBE melalui sistem aplikasi Peladen.	Setiap triwulan	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1
16.	Kecurangan (<i>Fraud</i>) dalam penyusunan laporan keuangan.	ganti rugi/Tindakan Lain	Pengawasan Manajerial (Preventif)	Setiap tahun	https://drive.google.com/drive/folders/1ucbpGWVfbLhiSzd43v0qsJ67Y5TApizT?usp=sharing	1

6. Laporan Pemantauan Risiko SPBE (Triwulan II) sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah,
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat,
u.b.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Setda DIY,

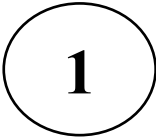
Faishol Muslim, S.I.P., M.Si.

Lampiran Surat Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/*Risk Event*, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Respon Terhadap Risiko Kecurangan, dan Laporan SPBE di Lingkungan Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2026.

Nomor : B/700.1.2/3256/BR.8

Tanggal: \${tanggal_naskah}

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II



Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
Sasaran : Meningkatkan kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.
Risiko : Kurangnya Dokumen Pendukung

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE
Risiko SPBE pada triwulan I berada pada Level Risiko SPBE “rendah” dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 6 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 7% dalam satu periode (Jarang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 50% (Cukup Signifikan). Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan
Pemenuhan kelengkapan dokumen rencana anggaran - Pengawasan melekat terkait pemenuhan dokumen pendukung pengajuan usulan pengadaan aplikasi SPBE

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
-	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester I



Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Sasaran : Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.

Risiko : Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE
Risiko SPBE pada triwulan I berada pada Level Risiko SPBE “sedang” dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 12 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 35% dalam satu periode (Sering Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 50% (Cukup Signifikan).
Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan
Pencermatan Dokumen Rencana Anggaran dengan memprioritaskan pengadaan Aplikasi pendukung Layanan - Review berjenjang terkait penyusunan Rencana Anggaran dengan mendasarkan skala prioritas

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
-	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester I

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Sasaran : Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.

Risiko : Belum Ada Rencana Terjadwal Terkait Updating Data Pada Webiste

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE
Risiko SPBE pada triwulan I berada pada Level Risiko SPBE “rendah” dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 6 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 7% dalam satu periode (Jarang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 30% (Cukup Signifikan).
Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan
Pemantauan rutin dengan penyusunan jadwal update yang disesuaikan dengan agenda kegiatan OPD yang telah terjadwal

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
-	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester I

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Sasaran : Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.

Risiko : Tidak Adanya Petugas atau Operator Aplikasi

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE
Risiko SPBE pada triwulan I berada pada Level Risiko SPBE “sedang” dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 12 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 35% dalam satu periode (Sering Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 50% (Cukup Signifikan).
Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan
Melakukan pengusulan formasi petugas TI dalam regulasi ke OPD terkait

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
- penunjukan petugas dengan surat tugas.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II



Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

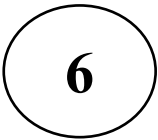
Sasaran : Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.

Risiko : Adanya Pihak Yang Mengenskripsi Data (Hacker)

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE
Risiko SPBE pada triwulan I berada pada Level Risiko SPBE “rendah” dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 8 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 7% dalam satu periode (Jarang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 70% (Signifikan).
Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan
Koordinasi dengan OPD terkait keamanan IT – Pembaruan password – pembatasan akses

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Pengawasan melekat bersama/berkoordinasi dengan OPD yang menangani keamanan SPBE	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester I



Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

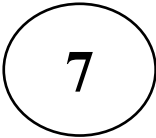
Sasaran : Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.

Risiko : Aplikasi Error/Bug

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE
Risiko SPBE pada triwulan I berada pada Level Risiko SPBE “sedang” dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 12 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-Kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 70% (Signifikan).
Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan
-

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Pengawasan melekat bersama/berkoordinasi dengan fihak ketiga/mitra penyedia aplikasi	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II



Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY

Sasaran : Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.

Risiko : Kesalahan Pengambilan Sumber Informasi

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE
Risiko SPBE pada triwulan I berada pada Level Risiko SPBE “rendah” dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 10 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 7% dalam satu periode (Jarang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 90% (Sangat Signifikan).
Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan
Memperbaiki kesalahan dalam pengambilan sumber informasi dan data yang akan digunakan

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Review berjenjang terkait data/konten yang akan di sampaikan	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan II

8

Nama Unit : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY
Sasaran : Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, bidang pelayanan dasar, bidang non pelayanan dasar, serta meningkatnya fasilitasi kehidupan beragama.
Risiko : Kesalahan Input Data Sumber Oleh Petugas Penginput

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini dan Proyeksi Risiko SPBE
Risiko SPBE pada triwulan I berada pada Level Risiko SPBE “sedang” dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 10 dimana kemungkinan terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga 90% (Sangat Signifikan). Risiko SPBE tersebut kedepannya akan dilakukan penanganan untuk mencapai Selera Risiko SPBE.

Penanganan yang telah dilakukan
Memperbaiki dan Menyusun SOP Input Data di Aplikasi

Rencana Penanganan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
Review berjenjang terkait hasil input data	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY	Semester II

a.n. Sekretaris Daerah,
Ast. Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat,
u.b.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat

Faishol Muslim, S.I.P., M.Si.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY tidak menerima suap/gratifikasi dalam bentuk apapun.
Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan laporkan melalui *hotline* 08985628111
Email : birokesra@jogjaprovo.go.id atau <https://lapor.jogjaprovo.go.id>